

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Dengan adanya peraturan tersebut maka internet menjadi salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam melakukan publikasi informasi pemerintahan kepada masyarakat, karena dengan menggunakan internet maka biaya yang dikeluarkan akan lebih ekonomis.

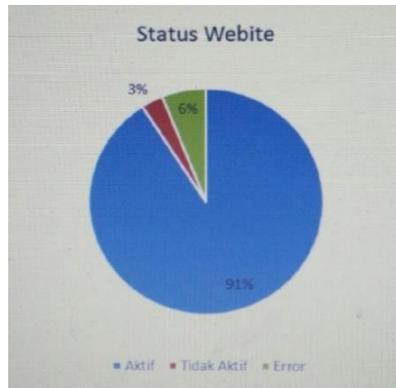
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi proses penyebaran informasi yang ditandai dengan pertukaran informasi melalui digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya dengan menggunakan internet sebagai alat penyampaian informasi. Saat ini internet bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder bagi sebagian masyarakat, karena penggunaan internet semakin meningkat yang mengakibatkan internet telah menjadi kebutuhan pokok setiap harinya.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mewajibkan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan organisasi dan pemerintahan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Dengan *website* pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, anggaran pengeluaran

kegiatan dan informasi mengenai pemerintah daerah kepada publik. Oleh karena itu, kehadiran *website* menjadikan pemerintah lebih transparan terhadap kegiatan dan informasi yang dipublikasikan dan diterima oleh pengguna informasi sehingga mencegah terjadinya asimetri informasi kepada masyarakat.

Memenuhi kebutuhan pengguna *website* pemerintah daerah, maka pemerintah membangun salah satu cara untuk memenuhi informasi masyarakat dengan menerapkan *e-government* atau pemerintah yang berbasis elektronik. Menurut Simangunsong (2010), *E-government* didefinisikan sebagai pemerintahan elektronik (juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau *Transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Simangunsong, 2010). Dengan menggunakan *e-government* maka publikasi informasi pemerintah kepada masyarakat akan lebih optimal, tepat waktu dan mudah di akses oleh pengguna laporan keuangan tersebut.

Gambar 1.1 Status Website Pemerintah Provinsi



Sumber : Jurnal Pekommas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Firdaus Masyhur yang dimuat dalam Jurnal *Pekommas*, Vol.17 No.1 Tahun 2014 yang berjudul *Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia Official Website Performance Local Government in Indonesia* memperoleh hasil bahwa penggunaan *website* sebagai strategi penyampaian informasi hampir seluruh pemerintah provinsi di Indonesia menggunakannya. Hanya terdapat 2 Provinsi yang statusnya belum maksimal menjalankan dan mengelola *website* sebagai media publikasi informasi seperti Bali dan Banten serta 1 provinsi yang memiliki *website* tidak aktif yaitu Maluku Utara. Sedangkan *website* Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama yang memiliki kecepatan *page speed grade* mencapai diatas 90%. *Page speed grade* merupakan kecepatan internet untuk mengakses halaman yang berada di dalam *website*. Artinya dalam mengakses halaman yang berada di *website* Pemda DIY sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Narayana Mahendra dalam Jurnal Komunikator Vol.7 No.1 Tahun 2015 yang berjudul *Pemanfaatan Website Organisasi sebagai Media Keterbukaan Informasi Publik: Studi pada Website PSSI www.pssi.org* menyatakan hasil penelitian bahwa pemanfaatan *website* sebagai media publikasi informasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah maupun provinsi lainnya. Pemanfaatan *website* Pemerintah Klungkung guna untuk mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik. Di dalam *websitenya* terdapat laporan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah, bank data serta agenda resmi pemerintah lainnya. Akan tetapi secara operasional, pemanfaatan *website* belum dilakukan secara maksimal karena belum memberikan peningkatan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses halaman *website*. Hal ini juga dikarenakan faktor penghambat dalam SDM untuk mengelola informasi dan pengelolaan *website* yang baik.

Website yang dikelola Dinas Kominfo DIY memiliki aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaannya. Aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan bagi Dinas Kominfo DIY untuk menyukseskan penggunaan *website* dalam ruang lingkup pemerintahan. Pertama, aspek *usability* atau penggunaan *website* yang mudah digunakan oleh pengguna *website*. Sehingga pengguna *website* mampu dan mudah mengakses tanpa ada hambatan selain itu meminimalisir kesalahan dalam mengakses *website*. Kedua aspek interaktif, artinya dengan adanya *website* Dinas Kominfo DIY dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat

dengan mudah. *Website* sendiri dapat menjadi sumber berita yang dapat menjalin komunikasi (*feedback*) antara penyedia informasi dan pengguna informasi *website*.

“Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pemerintahan yang mewajibkan kepada seluruh badan publik di 5 Kabupaten di Yogyakarta untuk membentuk pelayanan informasi kepada masyarakat dalam mendukung undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembentukan *website* sebagai pengembangan sistem penyediaan pelayanan informasi yang cepat, mudah diakses serta biaya yang murah. Hal ini menjadikan Sri Sultan Hamengkubowono X membuat Keputusan Gubernur untuk mewajibkan kepada setiap badan publik membentuk PPID. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Tugas PPID ialah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemda DIY.

Situs *website*, surat online, media sosial dan *call center* merupakan beberapa media online internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai alat media publikasi informasi nasional maupun daerah, pemberitaan mengenai kinerja Pemda Yogyakarta serta kegiatan internal dan eksternal Diskominfo DIY. *Website* Diskominfo DIY terbentuk ada pertengahan tahun 2017 dan telah dikunjungi sebanyak 9 ribu orang sedangkan pencarian pada pages mencapai 22 ribu.

Gambar 1.2 Official Website Diskominfo DIY



Sumber: <http://diskominfo.jogjaprov.go.id/>

Akhir tahun 2017, Diskominfo DIY meraih penghargaan sebagai badan publik peringkat 1 dalam memberikan informasi publik terbaik se DIY. Hal ini juga dapat dilihat pada *website* milik Diskominfo DIY bahwa dalam *website* tersebut Diskominfo DIY aktif memberikan informasi tentang putusan pemerintah, dan peristiwa yang telah terjadi. Diskominfo DIY merupakan lembaga negara yang baru dibentuk sejak Januari 2016 setelah sebelumnya Diskominfo DIY bagian dari Dinas Perhubungan DIY. Pada tahun 2008 Dishubkominfo DIY telah melaksanakan undang-undang mengenai KIP dan membentuk *website* akan tetapi semenjak tahun 2016 Diskominfo DIY membangun sistem informasi sendiri. Dan hal ini yang menjadikan peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan *website* milik Diskominfo DIY.

Setelah peneliti melakukan wawancara mendalam dilapangan bahwa penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Kominfo DIY secara keseluruhan mengenai *website* dan keterbukaan informasi publik dinilai dari hasil kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilakukan. Tidak memberikan nilai secara keseluruhan mulai dari perencanaan hingga evaluasi sehingga hal ini yang menjadikan perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dengan hasil yang diberikan Komisi Informasi Daerah DIY sebagai penyelenggara penghargaan. Hal ini juga diungkapkan Dody Junianto selaku kepala bidang data dan teknologi informasi Diskominfo DIY sebagai admin *website* bahwa penghargaan yang di dapatkan oleh Dinas Kominfo DIY merupakan penghargaan dalam menilai kegiatan monitoring dan evaluasi *website* dan tampilannya, namun tidak secara menyeluruh mengenai prosesnya.

Diharapkan dengan adanya situs *website* sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dapat menghindari kesenjangan informasi yang diperoleh. Sekretariat umum sebagai pengelola *website* publikasi informasi Diskominfo DIY merupakan perantara dalam menginformasikan berbagai berita sedangkan Humas Diskominfo DIY berfokus pada pemberitaan informasi mengenai Diskominfo DIY di media konvensional.

Tabel 1.1 Navigasi Diskominfo DIY Tahun 2017-2018

No	Content	Keterangan
1.	Header	Kepala <i>Website</i> Diskominfo DIY.
2.	Menu Navigasi	Menu arah <i>website</i> , berisi tab yang memudahkan pengunjung untuk mengakses menu-menu penting atau informasi yang sering dikunjungi daam <i>website</i> Diskominfo DIY misalnya profil, informasi, program kegiatan, berita, galeri, layanan dan kontak.
3.	Berita	Memuat informasi sekitar kegiatan Diskominfo DIY yang telah dilaksanakan, informasi kompetensi yang diadakan oleh Diskominfo DIY dan peristiwa yang terjadi di Yogyakarta serta berita edukasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
4.	Media Sosial	Tidak hanya melalui <i>website</i> , Diskominfo juga menyediakan situs lain yang sering digunakan oleh masyarkat umum seperti facebook, twitter, dan instagram. Dalam media sosial, Diskominfo DIY menyebarkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Diskominfo DIY maupun lembaga negara lainnya dan peristiwa hari besar di masyarakat.
5.	<i>Government Public Relations</i>	Berisi artikel-artikel penuh informasi dan edukasi yang dikelola oleh team GPR Kominfo.
6.	Link Terkait	Memuat tautan situs-situs resmi pemerintahan yang berkaitan satu sama lain, seperti Portal Pemerintah Daerah dan Komisi Informasi Pusat.

7.	Layanan	Berisi layanan mengenai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Jogja Istimewa Apps
8.	Jogja Istimewa TV	JITV berisikan siaran langsung serta waktunya tentang kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan atau sedang dilakukan setiap badan publik selain itu juga menyiarkan informasi atau berita peristiwa besar terjadi di masyarakat.
9.	Peta	Memuat alamat Diskominfo DIY sehingga masyarakat alamat letak kantor Diskominfo DIY.
10.	Kontak	Diskominfo DIY menyediakan <i>call center</i> , surat online serta nomor <i>fax</i> bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung tanpa harus menunggu lama atau untuk menyampaikan keluhan seputar komunikasi.
11.	Statistik Pengunjung	Berisikan jumlah pengunjung yang mendatangi <i>website</i> atau <i>page</i> yang disediakan oleh Diskominfo DIY

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2018

Sejauh ini *content website* Diskominfo DIY berupa beranda umum yang terdapat informasi atau berita mengenai kegiatan ataupun penghargaan Diskominfo DIY, profil mengenai struktur organisasi hingga unit kerja Diskominfo DIY dan profil para pejabat, program dan kegiatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 hingga tahun anggaran 2018, bagian informasi yang berisikan laporan kerja serta informasi publik dan layanan publik yang dapat diunduh oleh masyarakat dan terdapat produk hukum serta laporan keuangan setiap tahunnya, galeri yang berikan dokumentasi

foto dan video selama aktifitas dan kegiatan program yang dilakukan, layanan mengenai kebutuhan masyarakat seperti *email* pemda, PPID utama hingga informasi mengenai informasi daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azhar Lukika (2016) melakukan penelitian terhadap *website* sebagai media penyebaran informasi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kendal. Pemda Kendal dimana suatu pemda yang memperoleh juara satu penghargaan sebagai penyedia layanan informasi melalui internet atau *website* terbaik yang dilaksanakan di Makassar. Untuk memenuhi kriteria pemenang dalam penyedia layanan informasi melalui internet, bagian Humas Pemda Kendal harus memenuhi syarat dengan desain yang terbaik, konten informasi yang bermanfaat dan interaktif dalam berkomunikasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih berfokus pada berbagai media yang digunakan dalam penyebaran informasi serta kriteria tampilan *website*. Sedangkan peneliti ingin menganalisis *website* Diskominfo DIY pada tahun 2017 sebagai media publikasi dan informasi yang lebih berfokus untuk meneliti apakah selama ini *website* Diskominfo DIY sudah menjadi media dalam mempublikasikan informasi pada publik. Peneliti ingin melakukan penelitian ini karena diketahui bahwa kebebasan informasi merupakan kebutuhan dan hak atas masyarakat untuk memperolehnya. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sebagai badan publik memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan dan mengumumkan informasi kepada publik. Terlebih setelah Diskominfo DIY menerima penghargaan sebagai badan publik yang

mengevaluasi *website* sebagai media publikasi terbaik di Yogyakarta pada Tahun 2017.

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Intan Bahari (2018) yang melakukan penelitian terhadap *website* Pemda DIY sebagai media publikasi informasi dan pelayanan publik. Penelitian ini lebih berfokus pada dokumen acuan kerja *website* Pemda DIY seperti analisis sistem, *programmer*, *database engineering* dan *desainer sistem*. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Intan menjelaskan spesifikasi teknis pembaruan *website* Pemda DIY yang dilakukan oleh vendor untuk meningkatkan sistem pelayanan publiknya dan manajemen konten yang terdapat didalam *website* Pemda DIY. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berfokus pada pengelolaan *website* dalam mempublikasikan informasi dan berita kepada publiknya. Mulai dari perencanaan untuk publikasi berita, berita-berita yang dipublikasikan hingga melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan konten *website* Dinas Kominfo DIY. Selain itu juga penggunaan teori yang berbeda membuat peneliti ingin melakukan penelitian dengan objek yang berbeda juga.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengelolaan *Website* Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sebagai Media Publikasi dan Informasi Periode 2017-2018?
2. Apa saja Faktor-Faktor Pendukung serta Penghambat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan *Website* Diskominfo DIY sebagai Media Publikasi dan Informasi Periode 2017-2018?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui proses pengelolaan *website* Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Media Publikasi dan Informasi Tahun 2017-2018.
2. Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat selama proses pengelolaan dan pemanfaatan *website* Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Periode 2017-2018.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan pemanfaatan *website* sebagai media penyebaran informasi dan komunikasi publik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Diskominfo DIY sebagai bahan evaluasi kinerja pengelolaan *website* sebagai media penyampaian informasi publik sehingga kedepannya menjadi lembaga negara yang lebih baik.

E. KERANGKA TEORI

1. Konsep *Website*

Secara garis besarnya internet atau media baru merupakan jembatan penghubung antara jarak dan waktu. Perkembangan media komunikasi, internet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga komunikan dapat bertindak sesuai dengan pesan yang diterima oleh stimulus dan menimbulkan feedback kepada pemberi pesan. *Website* merupakan dunia informasi yang terbentuk dari halaman-halaman yang terhubung dengan fasilitas internet dan dapat menghubungkan dengan dokumen yang disebut *web page*. Rahmat Hidayat (2010 : 2) mengatakan *website* merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian gabungan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Secara umum situs *web* mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Fungsi Komunikasi.

Situs *web* yang mempunyai fungsi komunikasi pada umumnya adalah situs *web* dinamis. Karena dibuat menggunakan pemrograman *web (server side)* maka dilengkapi fasilitas yang

memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti *web mail, form contact, chatting form* dan yang lainnya.

b) Fungsi Informasi.

Situs *web* yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya, karena tujuan situs tersebut adalah menyampaikan isinya. Situs ini sebaiknya berisi teks dan grafik yang dapat di *download* dengan cepat. Pembatasan penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak seperti *schokwave* dan *java* diyakini sebagai langkah yang tepat, diganti dengan fasilitas yang memberikan informasi seperti *news, profile company, library, reference*, dan lain-lain.

c) Fungsi *Entertainment*.

Situs *web* juga dapat dimiliki fungsi *entertainment/hiburan*. Bila situs *web* kita berfungsi sebagai sasaran hiburan maka penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski tetap harus mempertimbangkan kecepatan downloadnya. Beberapa fasilitas yang memberikan fungsi hiburan adalah *game online, film online*, dan sebagainya.

d) Fungsi Transaksi.

Situs *web* dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa atau lainnya. Situs *web* ini menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik.

e) Fungsi Promosi.

Situs *web* dapat dijadikan sarana promosi dari suatu perusahaan atau perorangan yang menjalankan bisnis online karena dengan mempunyai *website* di internet dapat memperluas jaringan promosi sebuah perusahaan atau bisnis.

Pemanfaatan *website* yang sering kali digunakan untuk media informasi baik pada lembaga negara maupun swasta . Penggunaan *website* dianggap sangat strategis dan cepat dalam menyampaikan informasi atau peristiwa yang terjadi. Sebuah organisasi tidak memerlukan biaya yang banyak untuk membuat *website*. Selain itu juga tidak memerlukan batas waktu yang untuk mengakses informasi melalui *website*. Untuk memenuhi *website* yang ideal, berikut ada beberapa karakteristik dari *website* (<https://www.jurnalweb.com/ciri-website-user-friendly/> diakses 19 Maret 2018 jam 15.56WIB)

1) Berjalan dengan baik pada semua perangkat.

Untuk mengakses *website* yang berisikan informasi dan berita mengenai sebuah organisasi maka *website* seharusnya dapat diakses dan berjalan dengan baik pada perangkat manapun baik saat digunakan melalui *smartphone* atau dengan menggunakan layar komputer.

2) Waktu *Loading* Cepat

Pada saat publik sedang mengakses informasi yang disediakan melalui *website* maka yang diharapkan ialah *website* dapat diakses dengan cepat tanpa harus menunggu lama. Faktor kecepatan dalam mengakses *website* dianggap penting sebagai salah satu karakteristik *website friendly*.

3) Konten Berkualitas

Tentunya pertama kali seseorang ingin mengakses sebuah *website* untuk dijadikan sebuah informasi adalah dengan menemukan isi konten yang berkualitas. Artinya konten yang disediakan dalam sebuah *website* memiliki informasi yang sangat berguna bagi pengguna informasi terlebih jika informasi tersebut dapat mengubah perilaku seseorang.

4) Teks yang Mudah Dibaca

Agar informasi yang disampaikan dalam sebuah *website* tersampaikan kepada pengguna informasi maka penyusunan teks sangat penting. Hal ini agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dan mudah dibaca oleh pengguna informasi. Seperti penulisan angka, besar kecilnya huruf hingga ukuran dan warna *font*. Semua itu perlu diatur sehingga mudah diserap dan dibaca oleh publik.

5) Navigasi yang Intuitif

Sebuah navigasi situs *web* adalah seperti panel kontrol bagi sebuah *website*. Navigasi yang baik akan disenangi oleh pengunjung, menu navigasi yang akan menuntun pengunjung untuk menjelajahi seluruh konten *website*. [Navigasi](#) yang mudah dimengerti akan membuat pengunjung bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Hal ini penting, karena jika pengunjung tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya di *website* tersebut, akhirnya mereka akan menekan tombol “*back*” yang ada di browser, atau bahkan tombol “*close*” dan meninggalkan *website* tersebut.

6) Desain dan Penempatan Elemen

Desain yang bagus dengan penempatan elemen yang tepat dapat membuat sebuah *website* yang *friendly*. *Layout* yang didesain dengan warna yang sesuai untuk enak dipandang dapat membuat pengguna *website* bertahan lama dalam mengakses informasi. Pembuat *website* harus tahu dimana mereka harus menempatkan sebuah tombol agar sering di klik oleh pengunjung, selain itu mereka juga harus paham dimana harus menaruh *form* pencarian agar pengunjung tidak bingung ketika ingin mencari informasi tertentu, selain itu harus bisa menempatkan menu navigasi agar pengunjung bisa menjelajah dengan mudah, membedakan warna teks biasa dan warna teks *link* juga penting untuk diperhatikan agar pengunjung tidak bingung.

7) Menjaga Privasi Pengunjung

Ketika mengunjungi sebuah *website* maka yang diharapkan oleh pengguna *website* ialah menjaga privasi pengunjung yang mengakses *website* tersebut. Misalnya pengguna *website* mengakses video, foto dan galeri dalam sebuah *website* maka data pribadi pengakses dirahasiakan dan merasa aman dan tidak melanggar peraturan.

8) *User Experience* Menyenangkan

Situs *website* yang bisa menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengunjungnya tentu akan berdampak positif bagi pengunjungnya dan bagi perusahaan itu sendiri. Karena akan mudah untuk mengikat hati pengunjung untuk berlama-lama berada di *website*, melakukan pembelian dan bahkan bisa membuat pengunjung merasa ingin kembali lagi setiap waktu.

9) Identitas *Website*

Sebuah organisasi yang membuat *website* sebagai media publikasi dan informasi seharusnya menyertakan nama dan logo organisasi sehingga mudah untuk dicari saat berada di *search engine*. Selain itu juga pada *website* dimasukkan nomor, alamat, *email* dan *call center* yang dapat dihubungi saat menginginkan informasi secara langsung. Semakin banyak identitas organisasi yang diletakkan didalam sebuah *website* maka kredibilitas sebuah *website* memiliki nilai yang tinggi di mata publik.

Selain itu juga menurut Goldschmidt (Indrajit, 2005:53-58) aspek /kriteria penting yang harus dipertimbangkan oleh pembuat *website* pemerintah agar teknologi tersebut dapat secara efektif menunjang fungsi dan peranan e-government.

1. *Audience*
2. *Content*
3. *Interactivity*
4. *Usability*
5. *Innovation*

Setelah memenuhi karakteristik dan fungsi dari *website*, satu hal yang penting dalam menggunakan *website* sebagai media publikasi adalah pengelolaan *website* yang baik. *Website* yang dikelola dengan baik dan benar akan memudahkan pengguna *website* untuk menemukan halaman *website* yang diinginkan. Agar *website* bermanfaat dengan baik, maka diperlukan pengelolaan yang baik. Louis K. Falk (dalam Lukmanul 2004:10) memberikan beberapa tips seputar pengelolaan *website* melalui enam aturan, yaitu :

1. Setiap link yang ditawarkan harus online (no dead links)

Link yang tidak aktif dan terjadi terus menerus akan mengecewakan para pengunjung *website* yang berimbas pada jatuhnya kepercayaan public.

2. Tersedia kontak informasi (contact information).

Ketersediaan kontak informasi sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi yang lebih, menjadi salah satu indikator profesionalisme sebuah organisasi.

3. Penataan tempat informasi (placement of information).

Kebiasaan membaca dari kiri ke kanan menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan konten *website*, maka dari itu informasi yang lebih penting normalnya ditempatkan di sebelah kiri agar mendapatkan perhatian dari pengakses.

4. Pewarnaan (use of color)

Penggunaan warna selain agar informasi lebih mudah dibaca juga bertujuan untuk menambah daya tarik *website*, dengan catatan pemilihan warna tidak mengganggu upaya membaca informasi.

5. Mudah penggunaan.

Informasi dalam *website* mesti siap tersedia dan ditempatkan dalam urutan logis. Hyperlink harus akurat dan ditandai secara jelas. Setiap level dalam *website* seharusnya memungkinkan pengakses untuk kembali lagi pada level sebelumnya dan melangkah ke level selanjutnya (previous & forward level). Link menuju homepage juga harus tersedia guna mempermudah pengakses.

6. Bertujuan.

Tujuan *website* akan menentukan kualitas dan tipe informasi di dalamnya. *Website* dibagi menjadi tiga kategori :

- a. Presence model, digunakan untuk alat promosi.
- b. Informational model, dipenuhi dengan beragam materi pesan, termasuk informasi untuk pers.
- c. E-commerce model, di desain untuk menciptakan dan menjaga penjualan.

2. Media Publikasi Informasi Pemerintah

a. Media Publikasi

Dalam melakukan publikasi informasi diperlukannya alat untuk menyampaikan kepada masyarakat. Alat penyampaian informasi disebut juga sebagai media publikasi. Media yang digunakan sebagai media publikasi baik media konvensional maupun media baru yang sesuai dengan target *audiens*. Pemilihan media publikasi dengan mempertimbangkan target audiens hingga isi dari berita atau informasi sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam publikasi. Karakter dari masing-masing media memiliki target audiens sehingga sangat penting untuk mengelompokkan sasarannya sesuai media yang digunakan.

Baik media konvensional maupun media baru memiliki kekuatan dan keunggulan masing-masing dalam penyampaian informasi kepada khalayak. Terdapat beberapa media publikasi

konvensional yang dapat digunakan oleh pemerintah yaitu (Betty, 2012: 47 -49):

1) Surat Kabar

Surat kabar merupakan media publikasi utama yang banyak dibaca orang, mendapat kepercayaan dari pembaca, mempengaruhi opini publik, muncul secara teratur, dan secara intensif meliputi berita-berita lokal dan regional.

2) Majalah

Majalah merupakan salah satu media yang penting untuk menghasilkan ide-ide *feature* dan publisitas bergambar. Majalah akan dibaca dan cenderung akan disimpan sebagai bahan referensi untuk masa yang akan datang.

3) Siaran Radio

Radio mempunyai jangkauan yang luas tanpa terhalang letak geografis suatu daerah dan telah mempunyai publiknya sendiri, siaran radio mempunyai 21 keunggulan untuk mengutarakan gagasan atau pendapat secara sederhana dan langsung.

4) Siaran Televisi

Televisi adalah salah satu media informasi yang menjadi favorit publik, sehingga sangat efektif untuk penyebaran informasi. Televisi mempunyai cakupan wilayah siaran yang luas ditambah dengan daya tarik audio visual.

5) *Newsletter*

Newsletter adalah bentuk publikasi dari perusahaan yang berisikan informasi khusus yang tidak dapat ditemukan di buku atau media massa umum lainnya

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, media baru juga digunakan sebagai alat penyampaian informasi secara cepat, murah dan mudah. Menurut Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010, *website* sebagai media yang digunakan untuk alat publikasi informasi secara resmi. *Website* yang terdiri dari halaman-halaman dan terhubung dengan jaringan internet begitu memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa adanya batasan waktu dan dapat diakses berkali-kali. Akan tetapi tidak semua masyarakat dapat mengakses informasi melalui internet karena hanya segment masyarakat tertentu yang memiliki alat komunikasi seperti *smartphone*, *tablet*, komputer dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemilihan media publikasi yang sesuai dengan target sarannya sangat penting untuk keberhasilan dalam penyampaian informasi.

b. Jenis Pelayanan Publik

Pelayanan publik model baru yang sering digunakan lebih bersifat non-diskriminatif atau persamaan setiap hak masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa membedakan ras, etnik, agama dan latar belakang. Menurut Indrajit (2002: 29-34) terdapat tiga jenis-jenis pelayanan publik yang dapat diterapkan:

- a) Pelayanan *Publish*, jenis pelayanan publik ini merupakan pelayanan yang mudah untuk dilakukan oleh pemerintah dikarenakan ruang lingkungannya terbilang kecil dan tidak memerlukan sumber daya yang sangat besar dan beragam sehingga dapat menjalankan aplikasi sebagai media informasi dengan mudah dan beresiko sangat kecil. Namun interaksi dari implementasi ini bersifat satu arah sehingga masyarakat tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah. Pemerintah sekedar mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimiliki secara langsung dan masyarakat dapat mengakses secara bebas melalui internet tanpa adanya respon langsung dari pemerintah. Biasanya media yang digunakan dalam hal ini adalah *website* dengan menyediakan link yang ada.
- b) Pelayanan *Interact*, jenis pelayanan publik ini lebih bersifat aktif di bandingkan dengan pelayanan *publish* yang pasif. Implementasi *interact* lebih berkomunikasi dua arah antara *stakeholder* dan lembaga. Pemerintah bukan sekedar memberikan informasi dan mempublikasinya kepada masyarakat, tetapi masyarakat secara langsung dapat memberikan respon atau tanggapan mengenai informasi yang dipublikasikan sehingga masyarakat menjadi lebih aktif terhadap informasi. Biasanya media atau kanal yang digunakan oleh pemerintah untuk menampung aspirasi dan tanggapan dari masyarakat

melalui *chatting*, surat *online*, *call center* dan sebagainya. Selain itu pemerintah menyediakan alamat atau nomor yang dapat dihubungi oleh masyarakat kepada pemerintah yang tertera pada *link* yang telah tersedia.

- c) Pelayanan *Transact*, jenis pelayanan yang terakhir dapat dikatakan pelayanan publikasi yang sulit untuk dilakukan meskipun sifatnya interaksi dua arah. Jenis pelayanan publik transaksi ini lebih dikhususkan untuk transaksi yang berhubungan dengan perpindahan keuangan dari satu pihak ke pihak lain artinya jenis pelayanan ini tidak gratis dan memungut biaya dari masyarakat kepada pemerintah yang telah memberikan jasa pelayanan. Contohnya ketika seseorang ingin membuat permohonan perpanjangan SIM atau KTP melalui layanan online. Disini masyarakat melakukan transaksi dengan pemerintah dikarenakan masyarakat menerima jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

3. Peran *Website* dalam E-Government

Disetiap negara memiliki pemahaman dan arti yang berbeda mengenai e-government. *E-Government* merupakan sarana atau alat penyampaian informasi menggunakan teknologi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konsepnya, penggunaan *e-government* dalam menciptakan *good governance* bukanlah insiatif yang mudah dan murah dilakukan.

Penerapan *e-government* secara umum bertujuan untuk pembentukan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). E-government juga dapat diartikan sebagai pemerintah elektronik dimana sistem pemerintahannya menggunakan kemajuan teknologi sebagai pemenuhan kebutuhan publik. Strategi penerapan e-government pada SKPD Dinas Kominfo DIY untuk mendukung Pemda DIY membangun daerah Yogyakarta menjadi daerah yang berkemajuan berbasis teknologi.

Selain itu tujuan *e-government* meningkatkan hubungan pelayanan antara pemerintah dengan *stakeholdernya* seperti masyarakat, komunitas, organisasi, lembaga swasta dan sebagainya. Adapun manfaat utama dengan penerapan e-government dalam sebuah negara diungkapkan oleh Prattipati (dalam Norris, 2007: 159) “ terdapat 3 ranah utama pada penerapan pemerintah elektronik yaitu meningkatkan proses pemerintahan (administrasi elektronik), menghubungkan warga (warga dengan pelayanan publik elektronik) dan membangun interaksi eksternal (masyarakat elektronik). Maksud dari pernyataan Prattipati penggunaan e-government dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik yang dibentuk oleh pemerintah sebagai proses mengembangkan kinerja pemerintah yang lebih baik lagi. Selain itu masyarakat dapat memperoleh haknya sebagai warga negara untuk menikmati pelayanan publik yang disediakan oleh badan pemerintah serta yang terakhir membangun hubungan yang baik bersama publik

artinya dengan adanya e-government diharapkan pemerintah dapat berinteraksi secara langsung dan tidak langsung melalui portal-portal yang berhubungan dengan instansi terkait. Hal ini dikarenakan terkait definisi Bank Dunia bahwa e-government mengacu pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan akuntabilitas.

Dalam Buku Indrajit (2006: 13-15) ada beberapa faktor atau elemen keberhasilan yang mempengaruhi pelayanan *e-government* dalam bukunya berjudul “Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi)” :

a) Support

Dukungan merupakan elemen pertama yang penting dalam mencapai sebuah kesuksesan kegiatan. *E-Government* adalah konsep yang diterapkan dalam politik dan seharusnya pemerintah memberikan dukungan yang besar terhadap *e-government* dengan cara mengimplementasikannya dalam dunia politik bukan dengan menentanginya. Selain pemerintah, masyarakat memiliki andil yang sangat penting untuk mendukung keberadaan *e-government*. *E-government* diciptakan untuk masyarakat, sehingga masyarakat seharusnya memanfaatkan pelayanan informasi berupa *e-government* sebaik mungkin sebagai bentuk kesuksesan UU No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

b) *Capacity*

Elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-Government* terkait menajdi kenyataan. Dalam hal ini kemampuan untuk menyediakan sumber daya keuangan dan juga sumber daya manusia. Sumber Daya Keuangan harus disediakan sedetail mungkin untuk melaksanakan *e-government* agar dapat terlaksana dengan sukses. Fasilitas yang disediakan pun seperti perangkat komputer, informasi dan penyebaran informasi melalui media konvensional dan elektronik dapat menunjang keberhasilan *e-government*. Selain itu Sumber Daya Manusia yang memiliki etos kerja yang bagus, kemampuan *skill* yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam struktur harus di rekrut oleh pemerintah. Tanpa adanya SDM yang cukup dan memiliki etos kerja yang bagus serta dapat menjalin hubungan internal yang baik maka tidak akan berjalan sesuai dengan planning yang telah ditentukan.

c) *Value*

Dukungan dan kapasitas yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat memberikan manfaat jika tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sistem pelayanan dan alat komunikasi yang digunakan untuk dijadikan sebagai alat pelayanan dapat diakses dengan mudah dan diterima secara langsung oleh masyarakat sehingga memberikan *value* secara signifikan. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-Government*.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintah Bab 5 Pasal 13 ayat 1 menjelaskan standar pelayanan konten *website* pemerintahan sebagai berikut :

a) Profil Badan Pemerintahan

Merupakan konten yang berisikan informasi mengenai badan publik yang bersangkutan seperti sejarah badan publik, struktur organisasi, visi misi, tugas dan fungsi dan profil pejabat dalam organisasi.

b) Narasi Tunggal

Merupakan berita atau informasi yang diambil secara langsung dari Portal Nasional Menteri Kominfo sebagai salah satu fasilitas pengumuman berita Nasional.

c) Kebijakan dan Produk Hukum Badan Pemerintahan

Merupakan daftar peraturan perundangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan terkait tugas dan fungsi pokok badan publik terkait.

d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lembaga Badan Pemerintahan

Merupakan informasi mengenai kegiatan program kerja badan pemerintahan baik itu kegiatan yang sedang di lakukan, dan telah

dilakukan. Selain itu juga Pelaksanaan program dan kerja dapat berupa laporan kinerja setiap tahunnya baik laporan dokumentasi pelaksanaan hingga laporan anggaran yang digunakan selama pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

e) Profil Pelayanan Publik pada Badan Pemerintahan

Merupakan konten yang berisikan standar pelayanan publik badan publik mengenai jam operasional pelayanan publik, alamat yang dapat dikunjungi untuk mendapatkan pelayanan publik, proses alur permohonan dan pengaduan informasi serta tugas PPID pembantu untuk menyediakan layanan publik.

f) Layanan Aspirasi dan Pengaduan

Merupakan konten yang berisikan informasi mengenai proses penyampaian aspirasi, kritik, saran serta pengaduan. Selain itu juga dalam konten ini juga menjelaskan melalui media yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan oleh masyarakat.

g) Akun Resmi Media Sosial Badan Pemerintahan

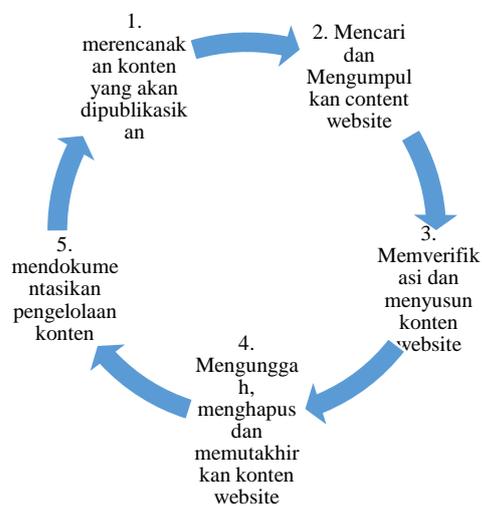
Merupakan konten yang berisikan mengenai informasi apa yang telah di publikasikan melalui media sosial seperti facebook, twitter dan instagram. Biasanya konten ini menjelaskan informasi-informasi seputar kegiatan badan publik di daerah masing-masing sesuai dengan lokasi badan publik terkait.

h) Kontak Pengelola *Website*

Merupakan informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi oleh pengakses *website* untuk mengetahui informasi dan data lebih lanjut. Selain itu peta lokasi kantor badan publik terkait.

Kegiatan pengelolaan dan pengisian *content website* perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Adapun model proses pengelolaan dan publikasi informasi *website* pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 mengenai Penyelenggara Portal dan Situs *Website* Badan Pemerintah sebagai berikut:

Bagan 1.1 Model Pengelolaan *Website*



Sumber : <https://www.kominfo.go.id/>

F. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori. Sehingga metode penelitian adalah cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu dengan maksud untuk mendapatkan informasi guna sebagai solusi atas masalah.

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005: 1), “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan peneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan, dimana peneliti langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data yang akurat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena penelitian mengenai penggunaan dan pengelolaan media internet dalam hal ini media *website* di Dinas Kominfo DIY.. Ada dua tujuan penelitian kualitatif, yaitu pertama menggambarkan dan mengungkapkan, dan kedua menggambarkan dan menjelaskan. Salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif adalah studi kasus. Penelitian kualitatif memberikan analisis data berupa uraian naratif berisi pemaparan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini dikarenakan permasalahan yang ingin diteliti membutuhkan penggalian informasi yang lebih mendalam terhadap fakta dan data. Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang digunakan untuk meneliti suatu peristiwa atau fenomena secara sistematis.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika D.I. Yogyakarta yang beralamat di Jl Bridgen Katamso. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga selesai data yang diperoleh dari objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan peneliti untuk jawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan hal yang penting karena akan menentukan hasil dari penelitian. Data akan dihasilkan oleh

peneliti melalui proses yang disebut pengumpulan data (Silalahi. 2009: 280). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan 2 cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data secara langsung yang akan digunakan sebagai data primer, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung atau data sekunder. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Jenis metode pengumpulan data yang sering digunakan untuk mencari informasi yang lebih intensif biasanya dengan metode wawancara(*interview*). Wawancara biasanya yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari keterangan lisan informan atau responden dengan cara dan pertanyaan yang terstruktur maupun tak terstruktur. Oleh sebab itu, menurut Silalahi (2009: 312) wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah responden yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data wawancara terbuka terstandar dikemukakan oleh Patton, Michael Quinn (1980) dalam penerapan pada evaluasi program. Ketika melaksanakan suatu program

hanya memungkinkan para partisipan selama periode waktu yang terbatas. Pertanyaan-pertanyaan ditulis sebelumnya secara pasti dengan cara yang sama ditanyakan selama berlangsungnya wawancara. Selanjutnya diungkapkan Ghony, Almanshur (2016: 184) adanya beberapa faktor utama menggunakan wawancara terbuka terstandar yang merupakan bagian dari evaluasi program: (1) Instrumen yang pasti digunakan di dalam evaluasi tersedia untuk pemeriksaan dengan para pembuat keputusan dan pengguna informasi. (2) Variasi diantara para pewawancara dapat diminimalkan di mana sejumlah pewawancara yang berbeda harus digunakan. (3) Wawancara sangat difokuskan sehingga waktu peserta wawancara digunakan secara berhati-hati.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi

Informan pertama adalah Dody Junianto, S.E., M.Eng selaku Kepala Sub Bagian Program, Data dan Teknologi yang akan menjelaskan proses publikasi informasi dan dokumentasi dengan menggunakan *website* sebagai salah satu media publikasi.

2. Kepala Seksi Pengembangan E-Government
Diskominfo DIY

Informan kedua adalah Dwi Lestari, S.Kom selaku administrator yang akan menjelaskan mengenai proses pengelolaan secara menyeluruh di Dinas Kominfo DIY.

3. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Informan keempat adalah Muhammad Aldy Yusuf dan Farisya Yuni yang merupakan masyarakat berdomisili di D.I. Yogyakarta dan memiliki pengalaman dalam mengakses *website* Diskominfo DIY pada tahun 2017. Muhammad Aldy Yusuf memiliki pengalaman mengakses *website* Dinas Kominfo DIY sebanyak 3-4 kali pada tahun 2017 sedangkan Farisya Yuni mengakses *website* Dinas Kominfo DIY sebanyak 2-3 kali pada tahun 2017.

Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan dengan menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Informan akan dipilih dengan jenis profesi yang berbeda dan memiliki pengetahuan terhadap tema penelitian, hal ini agar data wawancara yang didapatkan oleh peneliti menjadi lebih valid. Wawancara menjadi sangat penting dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan

variabel untuk penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengarah kepada masalah yang hendak diketahui sehingga kejujuran informasi dapat diketahui dengan pasti.

b. Dokumentasi

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti namun didapatkan dari berbagai sumber dokumen yang mendukung dan berhubungan dengan tema penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui teknik studi pustaka atau dokumen. Data yang di kumpulkan berupa kata-kata dan gambar yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, rekam video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong,2002:6). Dan dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan dokumen berupa foto dan dokumen laporan tahunan Dinas Kominfo DIY yang didapatkan melalui *website*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Ghony dan Almanshur (2016: 246) mengatakan analisis

data merupakan pencarian, pola-pola dalam data-perilaku yang muncul, objek-objek terkait dengan fokus penelitian.

Menurut Patton dalam Moleong (2000: 103) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan sesuai uraian dasar. Sedangkan menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2006:91) mengemukakan bahwa analisis data dilakukan dengan langkah berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah hasil kumpulan data yang diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen pembantu. Mereduksi data artinya merangkum dan memiliki hal pokok yang fokus pada sesuatu yang penting mengenai tema dan pola penelitiannya. Informasi yang dikumpulkan dilapangan kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan semakin memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

b) Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan setelah proses reduksi data telah selesai. Penyajian data yang mudah dipahami adalah dengan menganalisis data kualitatif yang sesuai. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek dalam meneliti.

c) Penarikan Kesimpulan

Tahap ini peneliti mulai mengambil atau menarik kesimpulan dari poin yang penting yang akan menjadi pokok pemikiran yang akan diteliti. Pengambilan keputusan merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah mengelola dan menyajikan data dalam suatu penelitian. Dimana peneliti membuat kesimpulan dari pemikiran sendiri dengan jalan melakukan perbandingan mengenai kenyataan dilapangan dengan teori berdasarkan data yang telah didapat (Nasution, 1995:149).

5. Uji Validasi Data

Dalam sebuah penelitian, peneliti akan menguji keabsahan validasi data yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui informasi yang diterima dari informan maupun dokumen sesuai dengan kajian teori yang digunakan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong (2000: 173) ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan keabsahan data yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

Data Penelitian Kualitatif dapat diuji dengan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2005: 83) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Denzin (dalam Moleong, 2000: 178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

- Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
- Triangulasi metode menurut Pattom (1987: 329) terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan pada penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- Triangulasi peneliti adalah memanfaatkan peneliti dan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan datanya.
- Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap, dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Penelitian saat ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dimana untuk menguji validasi data peneliti menggunakan sumber yang berasal dari informan yang berbeda dan membandingkannya sebagai tolak ukur derajat kepercayaan data. Peneliti akan mencocokkan hasil wawancara informan yang berasal dari Diskominfo DIY dengan wawancara dari pihak masyarakat; dan teknik pengumpulan data selain wawancara juga menggunakan dokumen resmi yang mendukung penelitian ini seperti buku, arsip hingga laporan perencanaan program kegiatan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika disusun untuk mempermudah penyajian dari hasil analisis data dan memudahkan proses analisis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini akan disusun yang terdiri dari empat bab, yaitu : Pertama, pada bab I berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu dan metode penelitian. Bab ini disajikan sebagai sebuah pendahuluan dan pengantar isi dari pembahasan penelitian pada bab-bab berikutnya.

Berikutnya yang kedua adalah bab II yang berisi mengenai gambaran umum dan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika D.I Yogyakarta khususnya pada pengelolaan *website* dan informasi dan komunikasi publik. Bab ini untuk memberikan informasi yang mendukung objek penelitian. Selanjutnya bab III yang berisi

tentang hasil analisis penelitian yang dikaji melalui metodologi yang diuraikan sebelumnya, yaitu tentang pemanfaatan atau pengelolaan *website* Diskominfo DIY untuk mendukung undang-undang No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik Periode 2017. Dan yang terakhir bab IV yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk objek yang diteliti serta bagi penelitian yang menggunakan metode yang sama di masa yang akan datang.